

**RENCANA KERJA PERUBAHAN**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2022**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 merupakan kewajiban bagi setiap perangkat daerah. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan

strategi seluruh aparat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja Perubahan yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perubahan pada Tahun 2022 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Magelang, 1 Agustus 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG



**SUSILOWATI, SE, MT, M.Sc**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19721101 199803 2 008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang .....	28
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
2.3.1 Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .....	32
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .....	34
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional.....	35
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan.....	35
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022 .....	36
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	54
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>55</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	55
3.3 Program dan Kegiatan.....	57
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>80</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 .....	9
Tabel 2.2 Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .....	13
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang .....	17
Tabel 2.4 Sasaran Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah . ....	28
Tabel 2.4.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	30
Tabel 2.4.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2022 Kota Magelang .....	38
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Perubahan Tahun 2022 Kota Magelang .....	54
Tabel 3.1 Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang.....	56
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .....	57
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2022dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Magelang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .....	60
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	81

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022.....	92
--	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang.

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun lalu dan evaluasi hasil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; pembahasan Rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; perumusan Rancangan Akhir Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk tahun kedua periode Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman

penyusunan Renja Perubahan dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2022, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Renja K/L, dan Renja Tahun 2022 BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;

Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;

Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 tepatnya pada pasal 343 bahwa Perubahan RKPD/Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan seperti terjadinya pandemi COVID-19 secara global dan telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 sebagai Bencana Non Alam, berdampak pada aktifitas perekonomian yang mengalami gejolak sehingga berdampak pada berbagai sektor yang kemudian memaksa untuk dilakukannya refocusing, realokasi, bahkan rasionalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penganggarannya untuk memenuhi kebutuhan penanganan dan pencegahan dampak pandemi COVID-19.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 adalah:

Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2022 meliputi:

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2022.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Magelang Tahun 2022 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Tujuan yang dikehendaki;

Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta subag/subid pelaksana.

Adapun capaian indikator kinerja pada Renja tahun 2021 sebagai bahan evaluasi bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
1.	Tujuan : Mewujudkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah  Sasaran : Terciptanya laporan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggung jawabkan	1. Nilai Opini BPK atas LKPD  2. Percentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP	100%  111,11%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.Percentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran  2.Percentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan  2.Percentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Akuntansi	100%  100%  100%
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase Penganggaran sesuai ketentuan	100%
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Percentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	100%

				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan	100%
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
2.	<u>Tujuan :</u> Mewujudkan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan. <u>Sasaran :</u> Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang  Barang Milik yang didayagunakan  Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu  Pelaporan Tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	110,06%  100%  100%  100%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah   Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD   Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahan ganan BMD	108,33%   101,04%
3.	Tujuan : Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Derajat otonomi Fiskal  Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap dana Pusat	78,92%  96,76%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100%
	Sasaran : Tercapainya peningkatan	Persentase Pertumbuhan PAD	96,33%	Kegiatan Pengelolaan	Persentase Realisasi	126,82%

	pendapatan daerah	Rasio Pajak daerah terhadap PAD	99,39%	pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	
		Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD	67,31%			

Sumber : LKjIP 2021 BPKAD Kota Magelang

Dari hasil evaluasi kinerja pada Tahun 2021, tidak ada kegiatan yang direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program maupun kegiatan BPKAD Kota Magelang pada tahun 2021 telah tersusun dengan baik. Jika dilihat dari capaian indikatornya yang rata-rata 100% bahkan lebih bisa pula dikatakan jika program dan kegiatan yang ada di BPKAD Kota Magelang pada Tahun 2021 telah berhasil menunjang terhadap pencapaian indikator-indikator kinerjanya.

Sesuai dengan hasil evaluasi di atas serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Dalam artian bahwa seluruh Program dan Kegiatan telah berhasil mencapai target yang ditentukan. Bahkan terdapat 1 Program dan 2 Kegiatan yang capaian indikator kinerjanya melebihi dari target, yaitu :

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,33%

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,04%

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 126,82%.

Hal tersebut tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang mendukung, di antaranya adalah :

Kinerja dari Pengurus Barang OPD yang semakin meningkat dalam menyusun laporan Barang Milik Daerah.

Terdapat aplikasi berupa Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM Aset) yang memudahkan dalam pelaporan pengelolaan barang.

Kesadaran Wajib Pajak (WP) yang semakin tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajaknya secara tertib.

Adanya pengembangan-pengembangan pada Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah yang memudahkan Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk menyetorkan pajak/retribusi daerah yang menjadi kewajibannya.

Namun terdapat pula beberapa program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang diatas yang capaiannya sesuai target, yaitu :

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sebagai berikut:

Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola keuangan daerah dalam proses penyusunan anggaran

Semua perangkat daerah telah paham dan patuh terhadap ketentuan yang ada dalam penatausahaan keuangan daerah

Semua perangkat daerah telah paham dan patuh terhadap ketentuan yang ada dalam menyusun laporan keuangan daerah  
Penerapan inovasi dalam peningkatan pelayanan dan monitoring pembayaran pajak daerah.

**Tabel 2. 2**  
**Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

No.	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
1.	<p>Selama kurun waktu tahun 2016-2021, realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan cenderung mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2021 terjadi penurunan pendapatan daerah dari komponen dana perimbangan. Hal ini disebabkan adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)</p>			<p>Menghitung Derajat Otonomi Fiskal adalah dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah. Salah satu solusinya adalah meningkatkan PAD melalui peningkatan kontribusi BUMD yang berupa pengelolaan BUMD secara profesional lagi.</p>

	<p>pada Tahun 2021 masih dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi sehingga DAU dan DAK yang diterima oleh Pemerintah Kota Magelang berkurang dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari komponen PAD yang berupa Pajak Daerah juga mengalami penurunan terutama dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, serta Pajak Parkir.</p>			
<b>2.</b>	<p>Indikator Rasio Ketergantungan Keuangan terhadap Dana Pusat menunjukkan tingkat kemampuan Kota Magelang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila dilihat dari realisasinya masih menunjukkan angka yang tinggi</p>		<p>Kesadaran Wajib Pajak (WP) yang semakin tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajaknya secara tertib</p>	<p>Diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan menggali potensi-potensi pendapatan yang ada.</p>

	serta penurunan dari tahun 2020. Penurunan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami kontraksi. Lesunya perekonomian memicu daya beli yang rendah sehingga sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu sektor jasa dan pariwisata yang menjadi salah satu andalan sumber pendapatan di Kota Magelang belum bisa berjalan normal akibat dampak pandemi Covid-19.		
<b>3.</b>		Semua perangkat daerah telah paham dan patuh terhadap ketentuan yang ada dalam menyusun Laporan Keuangan	Lebih intensif dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para pejabat pengelola keuangan dan pengelola barang di OPD

*Sumber: LKjIP Tahun 2021 BPKAD Kota Magelang*

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) *)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
2.18 . 4.04.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya kegiatan perkantoran</b>	100	%	100	%	100	%	100%	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar OPD (Jenis)	2	jenis	2	jenis	2	jenis	2	jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa rekening telepon, air, listrik, dan internet untuk kelancaran tugas (Jenis)	5	jenis	5	jenis	5	jenis	5	jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional. (unit)	50	kendaraan	65	kendaraan	50	kendaraan	50	kendaraan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan	43	orang	43	orang	43	orang	43	orang	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis alat kerbersihan yang tersedia	22	jenis	22	jenis	22	jenis	22	jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis atk yang tersedia	48	jenis	48	jenis	48	jenis	48	jenis	100%

4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang yang dicetak	15	jenis	15	jenis	15	jenis	15	jenis	100%	15 jenis	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis peralatan penerangan gedung yang tersedia	17	jenis	17	jenis	17	jenis	17	jenis	100%	17 jenis	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	surat kabar	100%	3 surat kabar	100%	100%						
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis logistik kantor yang terpenuhi	2	jenis	2	jenis	2	jenis	2	jenis	100%	2 jenis	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (karyawan)	57	karyawan	57	karyawan	57	karyawan	57	karyawan	100%	57 karyawan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan koordinasi antar daerah	76	kegiatan	76	kegiatan	76	kegiatan	76	kegiatan	100%	76 kegiatan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jumlah tenaga kontrak , petugas keamanan dan petugas lapangan yang tersedia	8	orang	8	orang	8	orang	8	orang	100%	8 orang	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah data administrasi yang dikelola	57	file	57	File	57	file	57	file	100%	57 file	100%	100%
<b>4.04 . 4.04.01 . 02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tercukupinya sarana dan prasarana kantor (%)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis perlengkapan kantor yang terpenuhi	3	Jenis	3	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	100%	3 Jenis	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor milik OPD yang terpelihara (Unit)	1	unit	1	Unit	4	unit	4	unit	100%	1 unit	100%	100%

4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	50	unit	50	Unit	50	unit	50	unit	100%	50 unit	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	7	jenis	7	Jenis	7	jenis	7	jenis	100%	7 jenis	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang terpelihara	6	jenis	6	Jenis	6	jenis	6	jenis	100%	6 jenis	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jenis mebeleur kantor yang terpelihara	27	bah	27	Buah	27	bah	27	bah	100%	27 bah	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bagian gedung kantor yang direhabilitasi	2	unit	2	unit	2	unit	2	unit	100%	2 unit	100%	100%
<b>4.04 . 4.04.01 . 06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terselenggaranya kegiatan perkantoran</b>												
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ilkhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja skpd	12	laporan	12	Dokumen	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jenis laporan keuangan semesteran, prognosis dan akhir tahun	2	laporan	2	Jenis	2	laporan	2	laporan	100%	2 laporan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja penetapan dan renja perubahan	2	dokumen	2	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKA Perubahan	2	dokumen	2	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Dokumen Renstra OPD	1	dokumen	0	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	100%	1 dokumen	100%	100%

4.04 . 4.04.01 . 06 . 20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1500	berkas	1800	berkas	1500	berkas	1500	berkas	100%	1500 berkas	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1	dokumen	1	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	100%	100%
<b>4.04 . 4.04.01 . 15</b>	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	jumlah pedoman bagi pengelolaan keuangan di jajaran Pemerintah Kota Magelang	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	jumlah Penetapan Perda tentang APBD	1	raperda	1	raperda	1	raperda	1	raperda	100%	1 raperda	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	jumlah Penetapan Perwal tentang penjabaran APBD	3	dokumen	3	dokume	3	dokumen	3	dokumen	100%	3 dokumen	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	jumlah Penetapan Perda tentang Perubahan APBD	1	raperda	1	raperda	1	raperda	1	raperda	100%	1 raperda	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah Penetapan Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD	2	raperwal	2	raperwal	2	raperwal	2	raperwal	100%	2 raperwal	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda tentang pertanggungjawaban APBD	1	Raperda	1	Raperda	1	Raperda	1	Raperda	100%	1 Raperda	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Walikota tentang pertanggungjawaban APB	1	Raperwal	1	Raperwal	1	Raperwal	1	Raperwal	100%	1 Raperwal	100%	100%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang terintegrasi	1	aplikasi	1	aplikasi		aplikasi		aplikasi	100%	1 aplikasi	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	jumlah laporan posisi kas daerah kepada Kementrian Keuangan RI setiap bulan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12 Laporan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Jumlah dokumen rancangan KUA	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen Rancangan PPAS	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Jumlah dokumen rancangan Perubahan KUA	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen Rancangan Perubahan PPAS	1	dokumen	1	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	jumlah DPA SKPD yang diteliti	29	OPD	29	OPD	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	jumlah DPA SKPD yang disyahkan	29	OPD	29	OPD	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran, SKPP, Laporan Sertifikasi, dan Laporan Rekonsiliasi SKPD	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100%	6 Laporan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Jumlah Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Belanja Langsung yang Sesuai dengan Ketentuan	5000	SP2D	5000	SP2D	5000	SP2D	5000	SP2D	100%	5000 SP2D	100%	100%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 32	Pengesahan dan penerbitan SPD	Jumlah Kegiatan penerbitan Surat Pengesahan Dana (SPD)	9	kegiatan	9	kegiatan	9	kegiatan	9	kegiatan	100%	9 kegiatan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	72	dokumen	72	dokumen	72	dokumen	72	dokumen	100%	72 dokumen	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan keuangan OPD yang diteliti dan diasistensi	72	laporan	72	laporan	72	laporan	72	laporan	100%	720 laporan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43	Pengendalian dan penerbitan SPM	Jumlah SPM yang diterbitkan	1500	SPM	1500	SPM	1500	SPM	1500	SPM	100%	1500 SPM	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	Jumlah laporan verifikasi dan pergeseran anggaran kas	29	laporan	29	laporan	29	laporan	29	laporan	100%	29 laporan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan	12	laporan	12	Laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	jumlah Laporan informasi penganggaran daerah	2	laporan	2	Laporan	2	laporan	2	laporan	100%	2 laporan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51	Penyusunan anggaran kas	Jumlah kegiatan penyusunan anggaran kas	9	Kegiatan	9	Kegiatan	9	Kegiatan	9	Kegiatan	100%	9 Kegiatan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA SKPD yang diteliti	29	OPD	29	OPD	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	jumlah DPPA SKPD yang disyahkan	29	OPD	29	OPD	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	Jumlah Penatausahaan Permohonan Bantuan dan Tak Terduga	1031	Berkas	1031	Berkas	1031	Berkas	1031	Berkas	100%	1031 Berkas	30%	30%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 59	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah yang akuntabel	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	12	Laporan	12	laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12 Laporan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	jumlah Laporan bulanan PPKD	12	laporan	12	Laporan	12	laporan	12	laporan	10 0%	12 laporan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	Jumlah sekolah dengan bendahara dan operator sekolah yang dibina,jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74	sekolah	74	sekolah	74	sekolah	74	sekolah	100%	74 sekolah	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti workshop	60	pegawai	60	pegawai	60	pegawai	60	pegawai	100%	60 pegawai	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bendahara dan PPK yang dibina	120	orang	120	Orang	120	orang	120	orang	100%	120 orang	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	Jumlah SP2D Belanja Tidak Langsung yang diterbitkan)	1100	SP2D	1100	SP2D	1100	SP2D	1100	SP2D	100%	1100 SP2D	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Sesuai Kebutuhan (Berkas)	1031	Berkas	1031	Berkas	1031	Berkas	1031	Berkas	100%	1031 Berkas	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas	Jumlah laporan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12 Laporan	100%	100%

	Penerbitan SP2D Belanja Langsung													
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107	Pembuatan Daftar Gaji	Daftar Gaji OPD sebagai Dasar Penerbitan SP2D	470	Daftar Gaji	100%	470 Daftar Gaji	100%	100%						
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pameran hasil pengelolaan keuangan daerah	2	kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan	100%	2 kegiatan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah database pengelolaan keuangan guna memperlancar pelaksanaan tugas.	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta	540	wajib pajak	100%	540 wajib pajak	100%	100%						
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah Pengajuan Keberatan dan Pengurangan Wajib Pajak	30	SK	30	SK	30	SK	30	SK	100%	30 SK	100%	100%
	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	Laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB (Laporan)	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12 Laporan	100%	100%
	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang terverifikasi dan terdistribusi (SPPT)	36200	SPPT	36200	SPPT	36200	SPPT	36200	SPPT	100%	36200 SPPT	100%	100%
	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan Pendapatan Daerah	jumlah laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	100%	100%

\	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek PBB yang telah terdigitalisasi dan termuktahirkan dengan kondisi terupdate di lapangan (Peta)	1	peta	1	peta	1	peta	1	peta	100%	1 peta	100%	100%
	Implementasi tapping box	jumlah laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	100%	100%
	Penatausahaan administrasi pemungutan pajak reklame dan pajak air tanah	Jumlah laporan pencapaian target pajak reklame dan PAT	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	100%	100%
<b>4.04 . 4.04.01 . 19</b>	<b>Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Meningkat dan teradministrasinya pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	Limit Barang Milik Daerah yang akan dipindah tangankan	2	kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan	100%	2 kegiatan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	Hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	4 kegiatan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	Jumlah hasil penelitian penjualan dan/atau pemusnahan Barang Milik Daerah	4	Kegiatan	4	kegiatan	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%	4 Kegiatan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	Sarana olahraga Pengelola Barang yang terpelihara selama 1 tahun.	2	lapangan	2	lapangan	2	lapangan	2	lapangan	100%	2 lapangan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor Pengelola Barang yang terpelihara selama 1 tahun	4	gedung kantor	100%	4 gedung kantor	100%	100%						
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11	Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah	Data BMD yang mutakhir.	12	kegiatan	12	bulan	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	12 kegiatan	100%	100%

4.04 . 4.04.01 . 19 . 12	Penghapusan Asset	Jumlah pekerjaan penghapusan aset yang sudah tidak layak	4	paket	4	paket	4	paket	4	paket	100%	4 paket	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	6	laporan	6	laporan	6	laporan	6	laporan	100%	6 laporan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15	Penjualan asset daerah	Jumlah paket Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dijual	3	paket	3	paket	3	paket	3	paket	100%	3 paket	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16	Penyelamatan asset daerah	jumlah laporan penyelamatan aset	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17	Penaksiran barang milik daerah	Jumlah kegiatan penaksiran Barang Milik Daerah	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	4 kegiatan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah pembinaan pengelolaan BMD kepada petugas pengelola BMD OPD.	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	4 Kegiatan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan optimalisasi pemanfaatan BMD sesuai kategori.	3	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan	100%	3 kegiatan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	10	dokumen	10	dokumen	10	dokumen	10	dokumen	100%	10 dokumen	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	jumlah kegiatan pemberian hak atas tanah negara	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1 Kegiatan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen bukti kepemilikan aset tanah Pemkot.	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100%	12 dokumen	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Laporan data tanah milik Pemerintah	2	laporan	2	laporan	2	laporan	2	laporan	100%	2 laporan	100%	100%

4.04 . 4.04.01 . 19 . 25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	Jumlah bidang batas fisik tanah	2	bidang	2	bidang	2	bidang	2	bidang	100%	2 bidang	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Perpanjangan 10 STNK kendaraan dan KIR 5 bus	18	unit	18	unit	18	unit	18	unit	100%	18 unit	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Jumlah pembayaran PBB untuk gedung kantor/Rumdin/Mess.	20	SPPT	20	SPPT	20	SPPT	20	SPPT	100%	20 SPPT	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	Jumlah pembayaran PBB tanah milik Pemda (Bidang)	223	bidang	223	tanah	223	bidang	223	bidang	100%	223 bidang	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	Rumah dinas dan mess yang terpelihara selama 1 tahun.	5	bangunan	5	bangunan	5	bangunan	5	bangunan	100%	5 bangunan	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	10	unit	10	unit	10	unit	10	unit	100%	10 unit	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	jumlah Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Sesuai Tujuan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	100%	100%
	Penyediaan jasa pengelolaan Barang Milik Daerah	Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12 bulan	100%	100%
	Penatan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.	jumlah Penatagunaan Tanah Pemkot dan Tersedianya Data Tanah Pemkot yang Akurat	3	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	100%	3 Kecamatan	100%	100%
	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kodefifikasi Barang yang tersedia	jumlah Perwal tentang Kodefifikasi Barang yang tersedia	1	perwal	1	perwal	1	perwal	1	perwal	100%	1 perwal	100%	100%
	Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot	Tanah untuk bangunan tempat kerja	1	lokasi	1	Lokasi	1	lokasi	1	Lokasi	100%	1 lokasi	100%	100%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang hingga Triwulan II Tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 3  
Sasaran Strategi  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022 (TWII)</b>	<b>%</b>
Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang berkualitas	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan	89,76%	96,67%	107,69%

keuangan daerah	Keuangan Daerah			
Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	89,77%	96,56%	107,56%
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,25%	42,00%	161,23%

Apabila dilihat dari tingkat kemajuan yang dicapai dari masing-masing indikator sampai dengan triwulan II tahun 2022 untuk indikator pencapaian sasaran strategis diperoleh 1 (satu) indikator dengan prosentase atau tingkat capaian sama dengan 100%, dan 3 (tiga) indikator yang tingkat kemajuannya lebih dari 100%. Maka bisa disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran BPKAD Kota Magelang telah baik.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Keuangan, disajikan dalam tabel berikut ini

**Tabel 2.4.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kota Magelang**

No.	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Indikator Renstra 2016-2021</b>												
	Nilai Opini BPK atas LKPD	✓	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP	-	-	87%	90%	90%		100%	100%	100%		
	Derajat Otonomi Fiskal	-	-	31,96%	33.88%	35.62%		25,29%	26.56%	28.11%		
	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	-	-	67,45%	65.79%	63.65%		66,04%	67.01%	65.71%		
	Persentase Pertumbuhan PAD			12,83%	11,37%	10,21%		9,49%	6,16%	9,84%		
	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD			12.33%	12.15%	12%		14.78%	12.38%	11.93%		
	Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD			3.33%	3.1%	2,91%		2.54%	1.78%	1.96%		
	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang			70%	75%	80%		76.18%	77.91%	88,05%		

	Barang Milik yang didayagunakan			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
	Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
	Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
<b>Indikator Renstra 2021-2026</b>												
	Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah					89,28%	89,77%			89,28%	89,77%	
	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah					89,76%	89,76%			89,76%	89,76%	
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran					100%	100%			100%	100%	
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perpendaharaan					100%	100%			100%	100%	
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi					82,76%	100%			82,76%	100%	
	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah					88,79%	89,77%			88,79%	89,77%	
	Cakupan Pengelolaan BMD					85,71%	85,71%			85,71%	85,71%	
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah					32,02%	36,16%			32,02%	36,16%	
	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah					23,82%	26,05%			23,82%	26,05%	
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah					100%	104,19 %			100%	104,19%	

## **2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menghadapi isu penting sebagai berikut:

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah kurang optimal;

Belum optimalnya pemanfaatan aset sebagai potensi PAD;

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditingkatkan.

### **2.3.1 Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

Tugas :

1. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di bawahnya;
4. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
5. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

7. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
8. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaaan barang/ jasa di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah;
10. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup tugasnya;
11. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
12. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
13. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang difokuskan pada pelayanan urusan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta meningkatkan kemandirian Keuangan Daerah.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Beberapa permasalahan dan hambatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana berdasarkan ketentuan ini terdapat beberapa substansi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah khususnya terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;

Fenomena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 juga memiliki imbas yang cukup signifikan dalam perhitungan prediksi pergerakan perekonomian di seluruh wilayah, termasuk di Kota Magelang khususnya dalam penentuan kebijakan pendanaan daerah;

Amanat dari PP Nomor 12 Tahun 2019 agar daerah memenuhi kewajiban-kewajiban belanja wajib yang besarannya ditentukan peraturan perundangan yang berlaku. Ketidakpatuhan akan ketentuan ini berakibat pada penundaan transfer atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum. Oleh karena itu perlu kecermatan dalam penganggaran dan pengambilan kebijakan belanja daerah.

### **2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional**

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026, ditetapkan visi pembangunan Kota Magelang yaitu “**Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia**” Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

MISI I	Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.
MISI 2	Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
MISI 3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif.
MISI 4	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
MISI 5	Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, sebagai garda depan Urusan, menyelenggarakan urusan Keuangan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-3 Kota Magelang yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif

### **2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan**

Dalam meningkatkan pelayanan urusan/bidang , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

Belum terpenuhinya standar kualitas penganggaran sesuai dengan ketentuan;

Belum terpenuhinya kualitas penatausahaan keuangan;

Belum terpenuhinya standar kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;

Kurang optimalnya penerimaan PAD;

Kurang optimalnya Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

Kurang efisiensinya Penggunaan Barang Milik Daerah;

Kurang optimalnya Pengamanan Barang Milik Daerah:

Kurang terpenuhinya kualitas Penatausahaan BMD;

Kurang optimalnya Pemindahtanganan BMD.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai;

Komitmen semua pegawai untuk mencapai visi dan misi Kota Magelang

Ketersediaan SDM yang lebih dapat dioptimalkan

Adanya Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang bisa dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Mgeland.

### **2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022**

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah pada tahun 2022
- b. Menetapkan kerangka pendanaan yang bisa menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada konsep money follow programme priority
- c. Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD**

Renja Perubahan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. Rancangan awal Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 0 (nol) program dan 0 (nol) kegiatan, Urusan Pilihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 03 program dan 06 kegiatan. Serta 01 program pendukung dan 07 Kegiatan untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2. 4.2**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2022**  
**Kota Magelang**

Nama Perangkat Daerah: BPKAD Kota Magelang

lembar..... dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting 12
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	54,523,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun jumlah dokumen renstra yang di review	2 dokumen 1 Dokumen	66,523,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,854,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	2,854,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	2,689,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	2,689,000		

			Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,317,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	3,317,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,470,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	3,470,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3 Dokumen	10,569,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 laporan	10,569,000	

			Kinerja SKPD								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	8,997,277,328	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	48 Orang	8,789,571,236	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	13,297,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun	24 Laporan	13,297,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	63,817,494	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	18 Laporan	63,817,494	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 orang	74,660,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 orang	75,060,000	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Magelang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	35 Paket	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangannya	35 ruangan	6,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	80 Paket	15,464,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis bahan logistik kantor yang dibeli	1 jenis 80 orang	15,464,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	13,039,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah dan jenis barang yang dicetak	15 jenis	10,039,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	5,400,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	22 Paket	6,953,000	Penyediaan Bahan/Material		Jenis bahan/material kebersihan yang disediakan	22 jenis	6,953,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah Laporan Fasilitasi	40 Laporan	25,664,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	61 kunjungan	24,368,000	

			Kunjungan Tamu								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	120,988,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan	42 kegiatan	120,988,000	
	Pengadaan Mebel	Kota Magelang	Jumlah mebel yang diadakan			Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan	1 unit	3,273,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 paket	491,695,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 paket	439,482,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2100 Laporan	79,955,791	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat yeng dikelola	2000 surat	79,955,791	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	371,124,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	5 jenis	371,124,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	4 Laporan	132,064,747	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah SM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	8 orang	132,064,747	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 unit	211,616,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang terpelihara Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya	24 unit 24 buah	211,616,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit	390,975,494	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara Jumlah perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbit Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya	63 unit 6 buah 63 unit	398,983,494	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 Unit	73,726,416	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	16 jenis	73,726,416	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Magelang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	3 Unit	144,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara	3 unit	144,000,000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	12 Unit	841,354,763	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau direhabilitasi	12 unit	841,354,763	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Magelang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	62,511,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS 2023	2 dokumen	49,797,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	27,465,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen Perub KUA dan Perub PPAS 2022	2 dokumen	27,465,000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	32,975,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2023	28 Dokumen	32,975,000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	11,825,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		jumlah dokumen RKPA SKPD	28 Dokumen	995,000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	9,601,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		jumlah DPA SKPD Tahun 2023	28 Dokumen	9,601,000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	7,343,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		jumlah DPPA SKPD tahun 2022	28 dokumen	7,343,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah	Kota Magelang	Jumlah Peraturan Daerah	2 Dokumen	142,637,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan		Jumlah Raperda tentang APBD dan Perwal	2 dokumen	142,637,000	

	tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		tentang Penjabaran APBD TA 2023			
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Magelang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	79,939,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022	2 dokumen	76,979,000	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	112 Dokumen	9,186,000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD	112 dokumen	9,186,000	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	11,117,000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	12 laporan	11,117,000	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,	16 Dokumen	23,603,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,		Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	16 laporan	23,603,000	

	Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Magelang	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	2 Dokumen	43,408,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Berita Acara Rekonsiliasi Data Pajak	2 dokumen	43,408,000	

			Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	147,072,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Laporan Aliran Kas	12 laporan	145,442,000	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Magelang	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	25,139,000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Perwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 dokumen	25,139,000	

			awaban Sub Kegiatan								
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	102 Dokumen	44,300,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban		Berita Acara Hasil Rekonsiliasi	103 dokumen	44,300,000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	39,871,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan konsolidasi bulanan	12 laporan	39,871,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Kota Magelang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala	2 Dokumen	77,190,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban		jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 dokumen	77,190,000	

	n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Daerah tentang Penjabaran Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota			ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD	Kota Magelan g	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	12,226,000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD		Jumlah Laporan prognosis	1 laporan	12,226,000	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Magelan g	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggar aan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	79,172,250	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Raperwal tentang Bagan Akun Standar	1 dokumen	64,412,250	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Magelan g	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	7,643,000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Raperwal tentang Kebijakan Akuntansi	1 dokumen	7,643,000	Hapus Sub Kegiatan
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	Kota Magelan g	Jumlah Orang yang Mengikuti	102 Orang	74,967,000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan		Laporan Pembinaan	4 laporan	74,967,000	

	Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	15,342,620 ,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	44,590,124,203	
	Penyusunan Standar Harga	Kota Magelang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	41,218,000	Penyusunan Standar Harga		Jumlah perwali standarisasi harga dan biaya	3 dokumen	53,288,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	25,860,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	3 dokumen	22,899,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	226,120,165	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Laporan Pentauusahaan BMD	7 dokumen	213,367,165	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	56,506,000	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen inventarisasi BMD	1 laporan	56,506,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan	1 Laporan	503,335,000	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah tanah untuk bangunan tempat kerja	1 dokumen	503,335,000	

			Barang Milik Daerah								
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	271,240,000	Penilaian Barang Milik Daerah		Laporan Hasil penilaian Barang Milik Daerah	1 lokasi	165,741,000	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan , Pemindahtanganan, Pemusnahan , dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	94,015,802	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Laporan kegiatan usulan penjualan, pemusnahan, dan penghapusan BMD	6 laporan	90,405,802	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 Laporan	131,695,832	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Laporan Barang Milik Daerah	7 laporan	131,695,832	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	112 orang	38,710,000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Laporan Hasil Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	14 laporan	38,710,000	

			Kabupaten/ Kota								
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1,352,027, 916	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Laporan kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	1 Laporan	1,351,577,916	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	18,478,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Laporan Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	18,478,000	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 Laporan	68,985,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Peta Digitalisasi PBB yang terupdate	17 Peta	68,985,000	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Magelang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	800 obyek pajak	24,180,000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Dokumen BPHTB yang tervalidasi Laporan Penilaian PBBP2	800 dokumen 20 laporan	24,180,000	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Ketetapan	36.000 Dokumen	66,219,000	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Berkas SPPT PBB P2	36000 SPPT	66,219,000	

			Pajak Daerah								
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	7,879,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Laporan Realisasi Jenis Pajak	12 Laporan	7,879,000	
	Penagihan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	313,596,000	Penagihan Pajak Daerah		Jenis laporan	8 Jenis	253,396,000	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Dokumen	116,877,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Laporan tunggakan wajib pajak	12 Laporan	116,877,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	87,185,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Raperda tentang Retribusi Daerah dan Raperwal tentang Retribusi Daerah serta Laporan pembinaan retribusi	3 dokumen	87,185,000	
			TOTAL	<b>31,912,431,998</b>				TOTAL	<b>60,706,105,109</b>		

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai unsur penunjang pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2023 yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk perubahan tahun 2022 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut: (tidak ada)

**Tabel 2. 5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Perubahan Tahun 2022 Kota Magelang**

Nama Perangkat Daerah : BPKAD Kota Magelang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “**Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur**”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV “**Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing**”. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4)revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangung lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi

Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang**

<b>No.</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Kota Magelang</b>
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan
2	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan
3	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamm dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang**

Dalam Mendukung visi dan misi Walikota Magelang, tujuan dan sasaran Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Pemerintahan masuk pada misi ke-3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif. Sedangkan, Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan Misi ke-3 Walikota dan Wakil Walikota Magelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 2**  
**Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2022																												
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	1. A = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. B = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (A+B)/2 x 100%	89.76%																												
2		Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang berkualitas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">No</td> <td style="width: 10%;">Komponen Perencanaan Kinerja</td> <td style="width: 10%;">Bobot</td> <td style="width: 10%;">Bobot Komponen</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> <td>a. Rencana Strategis (10%), analisis dan implementasi Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (15%)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengakuan Kinerja</td> <td>25%</td> <td>a. Penilaian pengakuan (5%) b. Kritik dan saran (10%) c. Implementasi pengakuan (7.5%)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> <td>a. Penilaian pelaporan (5%) b. Kritik dan saran (5%) c. Implementasi pelaporan (5%)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10%</td> <td>a. Penilaian evaluasi (5%) b. Kritik dan saran (5%) c. Implementasi hasil evaluasi (5%)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ciptakan Kinerja</td> <td>20%</td> <td>a. Kinerja yang diapresiasi (10%) b. Kinerja yang disampaikan (semenyusun) (10%) c. Kinerja lulus berjalan (pendukung) (5%)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td><td>100%</td></tr> </table>	No	Komponen Perencanaan Kinerja	Bobot	Bobot Komponen	1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), analisis dan implementasi Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (15%)	2	Pengakuan Kinerja	25%	a. Penilaian pengakuan (5%) b. Kritik dan saran (10%) c. Implementasi pengakuan (7.5%)	3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Penilaian pelaporan (5%) b. Kritik dan saran (5%) c. Implementasi pelaporan (5%)	4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Penilaian evaluasi (5%) b. Kritik dan saran (5%) c. Implementasi hasil evaluasi (5%)	5	Ciptakan Kinerja	20%	a. Kinerja yang diapresiasi (10%) b. Kinerja yang disampaikan (semenyusun) (10%) c. Kinerja lulus berjalan (pendukung) (5%)	Total			100%	100%
No	Komponen Perencanaan Kinerja	Bobot	Bobot Komponen																														
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), analisis dan implementasi Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (15%)																														
2	Pengakuan Kinerja	25%	a. Penilaian pengakuan (5%) b. Kritik dan saran (10%) c. Implementasi pengakuan (7.5%)																														
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Penilaian pelaporan (5%) b. Kritik dan saran (5%) c. Implementasi pelaporan (5%)																														
4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Penilaian evaluasi (5%) b. Kritik dan saran (5%) c. Implementasi hasil evaluasi (5%)																														
5	Ciptakan Kinerja	20%	a. Kinerja yang diapresiasi (10%) b. Kinerja yang disampaikan (semenyusun) (10%) c. Kinerja lulus berjalan (pendukung) (5%)																														
Total			100%																														
3		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang tepat waktu	89.76%																												

				Persentase pencairan belanja sesuai pengajuan Pelaporan Keuangan sesuai SAP DO = (A+B+C)/3 x 100%	
4		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Percentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	ratio jumlah pemanfaatan BMD terhadap potensi pemanfaatan BMD Rasio pensertifikatan tanah Persentase pengumpulan usulan RKBMD secara benar dan tepat waktu Persentase pengumpulan Laporan BMD yang benar dan tepat waktu DO : $(A+B+C+D)/4 \times 100\%$	89.77%
5	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Anggaran PAD Anggaran Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman $(A/B) \times 100\%$	36.16%
6		Meningkatnya pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	PAD tahun( t) Pendapatan Daerah tahun( t) $(A/B) \times 100\%$	26.05%

### **Program dan Kegiatan**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam mengimplmetisikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk perubahan tahun 2022 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada perubahan tahun 2022 pada awalnya disusun

sebanyak 07 program. Namun dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, dilakukan beberapa penyesuaian menjadi 04 program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan (4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2022**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Kota Magelang**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target				
5						5	02	01	2.0	1	5	77,422,000	89,422,000	31,404,647,890	60,706,105,109			46,312,232,600			
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																					
5	02					KEUANGAN															
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												11,934,956,000			
5	02	01	2.0	1	Pe	rencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												35,866,000			
5	02	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun jumlah dokumen renstra yang di review	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	2 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	54,523,000	66,523,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	6,000,000
5	02	01	2.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen RKASKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,854,000	2,854,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	4,049,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
5 02 01 2,0 1 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,689,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	3,756,000		
5 02 01 2,0 1 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,317,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian,	96.67 %	4,454,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah				
		umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.															administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.			
5 02 01 2,0 1	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,470,000	3,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	4,251,000			
5 02 01 2,0 1	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan,	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	10,569,000	10,569,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi	96.67 %	13,356,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
		administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.													keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.			
5 02 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														8,968,757,554	8,866,685,730		8,935,514,000
5 02 01 2.0 01 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	55 orang	48 orang	100 %	100 %	8,899,646,554	8,789,571,236	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	8,846,728,000	
5 02 01 2.0 03 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi	Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	24 laporan	24 laporan	100 %	100 %	13,297,000	13,297,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran	96.67 %	17,223,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum		Sesudah			
		kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.														dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.			
5 02 01 2.0 07 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/n/Semesteran SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD yang disusun	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	18 laporan	18 laporan	100 %	100 %	55,814,000	63,817,494	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	71,563,000		
5 02 01 2.0 5	Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah										0	75,060,000				80,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5 02 01 2.0 11 5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						75 Orang				0	75,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80,000,000	
5 02 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											140,606,000	192,212,000				151,244,000	
5 02 01 2.0 01 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangannya	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	35 ruangan	35 ruangan	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	6,600,000	
5 02 01 2.0 04 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli Jumlah pegawai yang disediakan makan minum harian	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	1 jenis 80 orang	1 jenis 80 orang	100 %	100 %	15,464,000	15,464,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum,	96.67 %	16,237,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum		Sesudah			Sebelum
		penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda Sesuai ketentuan.														penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	
5 02 01 2.0 05 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah dan jenis barang yang dicetak	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	15 jenis	15 jenis	100 %	100 %	10,379,000	13,039,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	14,206,000
5 02 01 2.0 06 6	Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian,	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	5,400,000	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi	96.67 %	5,670,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Target	Tolok Ukur	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
		administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.														kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.		
5 02 01 2.0 07 6	Penyediaan Bahan/Material	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jenis bahan/material kebersihan yang disediakan	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	22 jenis	22 jenis	100 %	100 %	6,953,000	6,953,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	7,302,000	
5 02 01 2.0 08 6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	29 kunjungan	61 kunjungan	100 %	100 %	18,536,000	24,368,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah,	96.67 %	19,462,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah			
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Tolok Ukur	Target
																	administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	
5 02 01 2.0 6	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	20 kegiatan	42 kegiatan	100 %	100 %	77,874,000	120,988,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	81,767,000	
5 02 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	442,755,000				506,500,000	
5 02 01 2.0 7	Pengadaan Mebel			Jumlah mebel yang diadakan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Unit			0	3,273,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Catata n Pentin	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		
5 02 01 2.0 06 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			51 Unit				0	439,482,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	
5 02 01 2.0 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											551,860,000	583,144,538				580,598,000	
5 02 01 2.0 01 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah surat yang dikelola	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	2000 surat	2000 surat	100 %	100 %	75,954,000	79,955,791	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	79,907,000	
5 02 01 2.0 02 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	5 jenis	5 jenis	100 %	100 %	365,124,000	371,124,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum,	96.67 %	383,380,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum		Sesudah		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
		penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.														penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.		
5 02 01 2,0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah SM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	8 orang	8 orang	100 %	100 %	110,782,000	132,064,747	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	117,311,000	
5 02 01 2,0 9	<b>Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										1,586,221,103	1,669,680,673				1,645,234,000		
5 02 01 2,0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan,	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinasjabatan yang terpelihara dengan baik	BMD Penunjang Urusan Pemda yang terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	24 unit	24 unit	80 %	80 %	211,616,000	211,616,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi	96.67 %	222,196,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
		administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	terbayarkan pajaknya												keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.		
5 02 01 2.0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	BMD Penunjang Urusan Pemda yang terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	63 unit	63 unit	80 %	80 %	382,973,000	398,983,494	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	401,245,000
5 02 01 2.0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara dengan baik	BMD Penunjang Urusan Pemda yang terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	16 jenis	16 jenis	80 %	80 %	70,306,000	73,726,416	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	96.67 %	73,821,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
		daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.														perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.		
5 02 01 2,0 9	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara	BMD Penunjang Urusan Pemda yang terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	3 unit	3 unit	80 %	80 %	144,000,000	144,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	151,200,000
5 02 01 2,0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau	BMD Penunjang Urusan Pemda yang terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua	96.67 %	96.67 %	12 unit	12 unit	80 %	80 %	777,326,103	841,354,763	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan	96.67 %	796,772,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
		dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	direhabilitasi	Kelurahan													penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													16,874,612,000	45,516,420,453			31,090,761,000
5 02 02 2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah													374,716,000	347,792,000			538,721,000
5 02 02 2.0 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	Jumlah dokumen KUA dan PPAS 2023	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	2 dokumen	2 dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	62,511,000	49,797,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	60,430,000
5 02 02 2.0 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	Jumlah dokumen PerubKUA dan Perub PPAS 2022	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	2 dokumen	2 dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	27,465,000	27,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	53,434,000
5 02 02 2.0 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2023	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	28 Dokumen	28 Dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	32,975,000	32,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	52,938,000
5 02 02 2.0 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	Jumlah dokumen RKPA SKPD	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	28 Dokumen	28 Dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	31,577,000	995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	49,026,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 02 02 2.0 05 1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	Jumlah DPA SKPD Tahun 2023	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	28 Dokumen	28 Dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	9,601,000	9,601,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	14,068,000
5 02 02 2.0 06 1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	Jumlah DPPA SKPD tahun 2022	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	28 dokumen	28 dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	7,343,000	7,343,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	11,482,000
5 02 02 2.0 07 1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	Jumlah Raperda tentang APBD dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2023	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	2 dokumen	2 dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	113,685,000	142,637,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	157,742,000
5 02 02 2.0 08 1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	Jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	2 dokumen	2 dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	89,559,000	76,979,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	139,601,000
5 02 02 2.0 02 Ko	ordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah											203,669,000	257,895,000					243,617,000
5 02 02 2.0 03 2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD	Pengelolaan perbendaharaan daerah yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	112 dokumen	112 dokumen	80 %	80 %	9,186,000	9,186,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	11,088,000
5 02 02 2.0 04 2	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	Pengelolaan perbendaharaan daerah yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	12 laporan	12 laporan	80 %	80 %	11,117,000	11,117,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	14,314,000
5 02 02 2.0 05 2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Pengelolaan perbendaharaan daerah yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	16 laporan	16 laporan	80 %	80 %	11,679,000	23,603,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	14,650,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
	Dana Transfer Lainnya																	
5 02 02 2,0 2	2,0 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi Data Pajak	Pengelolaan perpendaharaan daerah yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	2 dokumen	2 dokumen	80 %	80 %	43,408,000	43,408,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	39,733,500	
5 02 02 2,0 2	2,0 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Aliran Kas	Pengelolaan perpendaharaan daerah yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	12 laporan	12 laporan	80 %	80 %	106,940,000	145,442,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	135,975,000	
5 02 02 2,0 2	2,0 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan perpendaharaan daerah yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	1 dokumen	1 dokumen	80 %	80 %	21,339,000	25,139,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	27,856,500	
5 02 02 2,0 3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											264,227,000	320,609,250				308,423,000	
5 02 02 2,0 3	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Berita Acara Hasil Rekonsiliasi	Terwujudnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	103 dokumen	103 dokumen	86 %	86 %	34,963,000	44,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	42,279,000	
5 02 02 2,0 3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan konsolidasi bulanan	Terwujudnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	12 laporan	12 laporan	86 %	86 %	30,571,000	39,871,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	37,015,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
5 02 02 2.0 3	05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab dan Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD	Terwujudnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	1 laporan	1 laporan	86 %	86 %	77,190,000	77,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	99,376,000	
5 02 02 2.0 3	08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawab dan Pelaksanaan APBD	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan prognosis	Terwujudnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	1 laporan	1 laporan	86 %	86 %	12,226,000	12,226,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	16,794,000	
5 02 02 2.0 3	09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Raperwal tentang Bagan Akun Standar	Terwujudnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	1 dokumen	1 dokumen	86 %	86 %	36,167,000	64,412,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	37,975,000	
5 02 02 2.0 3	10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Raperwal tentang Kebijakan Akuntansi	Terwujudnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	1 dokumen	1 dokumen	86 %	86 %	7,643,000	7,643,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	13,007,000	
5 02 02 2.0 3	11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pembinaan	Terwujudnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	4 laporan	4 laporan	86 %	86 %	65,467,000	74,967,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	61,977,000	
5 02 02 2.0 4	Perkembangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah											16,032,000,000	44,590,124,203				30,000,000,000	
5 02 02 2.0 4	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang	Terwujudnya pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	100 %	100 %	100 %	100 %	16,032,000,000	44,590,124,203	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	30,000,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														1,272,216,566	1,275,947,799			1,409,976,600
5 02 03 2.0 1	Per 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah														1,272,216,566	1,275,947,799			1,409,976,600
5 02 03 2.0 01 1	Penyusunan Standar Harga	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah perwali standarisasi harga dan biaya	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	2 dokumen	3 dokumen	83 %	83 %	27,149,000	53,288,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %		39,537,750	
5 02 03 2.0 03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	7 dokumen	7 dokumen	83 %	83 %	20,540,000	22,899,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %		30,645,000	
5 02 03 2.0 05 1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Pentausahaan BMD	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	1 laporan	1 laporan	83 %	83 %	174,645,000	213,367,165	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %		202,021,000	
5 02 03 2.0 06 1	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi BMD	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	1 dokumen	1 dokumen	83 %	83 %	56,506,000	56,506,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %		61,693,200	
5 02 03 2.0 07 1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah tanah untuk bangunan tempat kerja	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	1 lokasi	1 lokasi	83 %	83 %	453,335,000	503,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %		497,126,000	
5 02 03 2.0 08 1	Penilaian Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Hasil penilaian Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	6 laporan	6 laporan	83 %	83 %	293,390,000	165,741,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %		311,286,000	
5 02 03 2.0 10 1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan kegiatan usulan penjualan, pemusnahan, dan penghapusan BMD	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	7 laporan	7 laporan	83 %	83 %	79,428,566	90,405,802	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %		69,393,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur
5 02 03 2.0 12 1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	14 laporan	14 laporan	83 %	83 %	131,613,000	131,695,832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %	151,838,400
5 02 03 2.0 13 1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	4 laporan	4 laporan	83 %	83 %	35,610,000	38,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %	46,436,250
5 02 04 2.0 1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>											1,932,952,667	1,994,776,916				1,876,539,000
5 02 04 2.0 1	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>											1,932,952,667	1,994,776,916				1,876,539,000
5 02 04 2.0 01 1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Laporan kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,189,553,667	1,351,577,916	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	1,230,549,000
5 02 04 2.0 03 1	Penyaluan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Laporan Penyaluan Kebijakan Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	18,478,000	18,478,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	23,188,000
5 02 04 2.0 06 1	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Peta Digitalisasi PBB yang terupdate	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	17 Peta	17 Peta	100 %	100 %	68,985,000	68,985,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	86,480,000
5 02 04 2.0 07 1	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Dokumen BPHTB yang tervalidasi	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	800 dokumen	800 dokumen	100 %	100 %	24,180,000	24,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	33,555,000
5 02 04 2.0 08 1	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Berkas SPPT PBB P2	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	36000 SPPT	36000 SPPT	100 %	100 %	66,219,000	66,219,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	79,302,000
5 02 04 2.0 10 1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Laporan Realisasi Jenis Pajak	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	7,879,000	7,879,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	10,887,000

5 02 04 2.0 1	11 Penagihan Pajak Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Jenis laporan	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	8 Jenis	8 Jenis	100 %	100 %	313,596,000	253,396,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	354,732,000
5 02 04 2.0 1	13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Laporan tunggakan wajib pajak	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	116,877,000	116,877,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	20,141,000
5 02 04 2.0 1	14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Raperda tentang Retribusi Daerah dan Raperwal tentang Retribusi Daerah serta Laporan pembinaan retribusi	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	3 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	127,185,000	87,185,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	37,705,000
<b>TOTAL</b>	<b>31,404,647,890</b>	<b>60,706,105,109</b>		<b>46,312,232,600</b>													

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKPD) maka disusunlah Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2022. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2022. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja perubahan Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada perubahan tahun 2022 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

**Tabel 4. 1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Perubahan Renja 2022 (Tahun n)		
					Target Kinerj a	Pagu Indikatif	Target Kinerj a	Pagu Indikatif	Target Kinerj a	Pagu Indikatif	Target Kinerj a	Pagu Indikatif	Target Kinerj a	Pagu Indikatif	
1			2	3	4		5		6		7		8		
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	0 2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	24,175%		24,175%		24,175%		24,175%		96,7%	
5	0 2	0 1	2 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	25%		25%		25%		25%		100%	
5	0 2	0 1	2 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun jumlah dokumen renstra yang di review	1 dokumen	16.639.750	1 dokumen	16.639.750	1 dokumen	16.639.750		16.639.750	3 dokumen	66.523.000
5	0 2	0 1	2 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	713.000	-	713.000	-	713.000	-	713.000	1 dokumen	2.854.000

5	0 2	0 1	2 .0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	672,250	-	672,250	-	672,250	-	672,250	1 dokumen	2,689,000
5	0 2	0 1	2 .0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	829,250	-	829,250	-	829,250	-	829,250	1 dokumen	3,317,000
5	0 2	0 1	2 .0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang disusun	1 dokumen	867,500	-	867,500	-	867,500	-	867,500	1 dokumen	3,470,000
5	0 2	0 1	2 .0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 laporan	2.642.2250	1 laporan	2.642.2250	1 laporan	2.642.2250	-	2.642.2250	3 laporan	10.569.000
0 2	0 1	2 .0 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	25%		25%		25%		25%		100%		
5	0 2	0 1	2 .0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	16 orang	2.197.392.80 9	48 orang	8.789.571.236						
5	0 2	0 1	2 .0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun	6 laporan	3,324,250	24 laporan	13,297,000						
5	0 2	0 1	2 .0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD yang disusun	5 Laporan	15.954.373,5	5 Laporan	15.954.373,5	4 Laporan	15.954.373,5	4 Laporan	15.954.373,5	18 Laporan	63.817.494
5	0 2	0 1	2 .0 5	<b>Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah</b>		Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaihan PD sesuai aturan										
5	0 2	0 1	2 .0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	18 orang	18,765,000	18 orang	18,765,000	18 orang	18,765,000	21 orang	18,765,000	75 orang	75.060.000
5	0 2	0 1	2 .0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	25%		25%		25%		25%		100%	
5	0 2	0 1	2 .0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/ penerangannya	1.500.00 0	9 ruangan	1.500.00 0	9 ruangan	1.500.00 0	9 ruangan	1.500.00 0	8 ruangan	35 ruangan	6.000,000
5	0 2	0 1	2 .0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli Jumlah pegawai yang	80 orang	3,866,000		3,866,000		3,866,000		3,866,000	80 orang	15,464,000

					disediakan makan minum harian											
5	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang yang dicetak	4 jenis	3.259.750	4 jenis	3.259.750	4 jenis	3.259.750	3 jenis	3.259.750	15 jenis	13.039.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 jenis	1,350,000	3 jenis	1,350,000	3 jenis	1,350,000	-	1,350,000	3 jenis	5,400,000
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan/Material	Jenis bahan/material kebersihan yang disediakan	6 jenis	1,738,250	6 jenis	1,738,250	5 jenis	1,738,250	5 jenis	1,738,250	22 jenis	6,953,000
5	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	15 kunjungan	6.092.000	15 kunjungan	6.092.000	15 kunjungan	6.092.000	16 kunjungan	6.092.000	61 kunjungan	24.368.000
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan	11 kegiatan	30.247.000	11 kegiatan	30.247.000	10 kegiatan	30.247.000	10 kegiatan	30.247.000	42 kegiatan	120.988.000
5	0	0	2	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	25%		25%		25%		25%		100%	
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 surat	19.988.947,8	2000 surat	79.955.791						
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 jenis	92.781.000	1 jenis	92.781.000	1 jenis	92.781.000	1 jenis	92.781.000	5 jenis	371.124.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Orang	33.016.1866,8	8 Orang	132.064.747						
5	0	0	2	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
5	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	-	-	-	-	-	-	1 unit	3,273,000	1 unit	3,273,000
5	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	109,870,500	11 unit	109,870,500	11 unit	109,870,500	12 unit	109,870,500	46 unit	439,482,000

<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	20%		20%		20%		20%		80%	
5	0	2	0	1	2	0	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang terpelihara Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya	6 unit	52,904,000	24 unit	211,616,000						
5	0	2	0	1	2	0	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara Jumlah perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbit Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya	16 unit	99.745.873,5	16 unit	99.745.873,5	16 unit	99.745.873,5	15 unit	99.745.873,5	63 unit	398.983.494
5	0	2	0	1	2	0	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	4 jenis	18.431.604	16 jenis	73.726.416						
5	0	2	0	1	2	0	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara	1 unit	55,500,000	1 unit	55,500,000	1 unit	55,500,000	-	55,500,000	3 unit	222,000,000
5	0	2	0	1	2	0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau direhabilitasi	3 unit	210.338.961	12 unit	841.354.763						
5	0	2	0	2				<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	DO : Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran, pelayanan penatausahaan keuangan, dan laporan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan	21,3325%		21,3325%		21,3325%		21,3325%		85,33%	
5	0	2	0	2	2	0	1	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Presentase Penganggaran sesuai ketentuan</b>	31 dokumen		30 dokumen		30 dokumen		30 dokumen		121 dokumen	
5	0	2	0	2	2	0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS 2023	1 Dokumen	12.449.250	1 Dokumen	12.449.250	-	12.449.250	-	12.449.250	2 Dokumen	49.797.000

			0 1													
5	0 2	0 2	2 .0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perub KUA dan Perub PPAS 2022	1 Dokumen	6,866,250	1 Dokumen	6,866,250	-	6,866,250	-	6,866,250	2 Dokumen	27,465,000
5	0 2	0 2	2 .0 1	0 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2023	7 Dokumen	8.243.750	7 Dokumen	8.243.750	7 Dokumen	8.243.750	7 Dokumen	8.243.750	28 Dokumen	32.975.000
5	0 2	0 2	2 .0 1	0 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKPA SKPD	7 Dokumen	248.750	7 Dokumen	248.750	7 Dokumen	248.750	7 Dokumen	248.750	28 Dokumen	995.000
5	0 2	0 2	2 .0 1	0 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	jumlah DPA SKPD Tahun 2023	7 Dokumen	2,400,250	7 Dokumen	2,400,250	7 Dokumen	2,400,250	7 Dokumen	2,400,250	28 Dokumen	9,601,000
5	0 2	0 2	2 .0 1	0 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	jumlah DPPA SKPD tahun 2022	7 Dokumen	1,835,750	7 Dokumen	1,835,750	7 Dokumen	1,835,750	7 Dokumen	1,835,750	28 Dokumen	7,343,000
5	0 2	0 2	2 .0 1	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda tentang APBD dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2023	1 Dokumen	35.659.250	1 Dokumen	35.659.250	-	35.659.250	-	35.659.250	2 Dokumen	142.637.000
5	0 2	0 2	2 .0 1	0 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022	1 Dokumen	19.244.750	1 Dokumen	19.244.750	-	19.244.750	-	19.244.750	2 Dokumen	76.979.000
5	0 2	0 2	2 .0 2		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan</b>	20%		20%		20%		20%		80%	
5	0 2	0 2	2 .0 2	0 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD	28 Dokumen	2,296,500	28 Dokumen	2,296,500	28 Dokumen	2,296,500	28 Dokumen	2,296,500	112 Dokumen	9,186,000
5	0 2	0 2	2 .0 2	0 4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	3 laporan	2,779,250	12 laporan	11,117,000						
5	0 2	0 2	2 .0 2	0 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	4 laporan	5.900.750	16 laporan	23.603.000						

5	0 2	0 2	2 .0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	Berita Acara Rekonsiliasi Data Pajak	1 Dokumen	10.852.000	1 Dokumen	10.852.000	-	10.852.000	-	10.852.000	2 Dokumen	43.408.000
5	0 2	0 2	2 .0 2	0 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Laporan Aliran Kas	3 Laporan	36.360.500	3 Laporan	36.360.500	3 Laporan	36.360.500	3 Laporan	36.360.500	12 Laporan	145.442.000
5	0 2	0 2	2 .0 2	1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Perwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	6.284.750	-	6.284.750	-	6.284.750	-	6.284.750	1 Dokumen	25.139.000
5	0 2	0 2	2 .0 3	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan</b>	21,5%		21,5%		21,5%		21,5%		21,5%	86%	
5	0 2	0 2	2 .0 3	0 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Berita Acara Hasil Rekonsiliasi	26 Dokumen	11.075.000	26 Dokumen	11.075.000	26 Dokumen	11.075.000	25 Dokumen	11.075.000	103 Dokumen	44.300.000
5	0 2	0 2	2 .0 3	0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan konsolidasi bulanan	3 Laporan	9.967.750	3 Laporan	9.967.750	3 Laporan	9.967.750	3 Laporan	9.967.750	12 Laporan	39.871.000
5	0 2	0 2	2 .0 3	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaba Pelaksanaan APBD dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjawaba Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	19.297.500	1 Dokumen	19.297.500	-	19.297.500	-	19.297.500	2 Dokumen	77.190.000
5	0 2	0 2	2 .0	0 8	Penyusunan Analisis Laporan	Jumlah Laporan prognosis	1 Dokumen	3.056,500	-	3.056,500	-	3.056,500	-	3.056,500	1 Dokumen	12.226,000

			0 3	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD												
5	0 2	0 2	2 .0 3	0 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Raperwal tentang Bagan Akun Standar	1 Dokumen	16.103.062,5	-	16.103.062,5	-	16.103.062,5	-	16.103.062,5	1 Dokumen	64.412.250
5	0 2	0 2	2 .0 3	1 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Raperwal tentang Kebijakan Akuntansi	1 Laporan	18.741.750	1 Laporan	18.741.750	1 Laporan	18.741.750	1 Laporan	18.741.750	4 Laporan	74,967,000
5	0 2	0 2	2 .0 4	9	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	25%		25%		25%		25%		100%	
5	0 2	0 2	2 .0 4	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	25%	11.147.5311. 051	25%	11.147.5311. 051	25%	11.147.5311. 051	25%	11.147.5311. 051	100%	44.590.124.20 3
5	0 2	0 3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Cakupan Pengelolaan BMD	20,75%		20,75%		20,75%		20,75%		83%	
5	0 2	0 3	2 .0 1		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtempahanan BMD	20,75%		20,75%		20,75%		20,75%		83%	
5	0 2	0 3	2 .0 1	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah perwal standarisasi harga dan biaya	1 Dokumen	13.322.000	1 Dokumen	13.322.000	1 Dokumen	13.322.000	-	13.322.000	3 Dokumen	53.288.000
5	0 2	0 3	2 .0 1	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah										
5	0 2	0 3	2 .0 1	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan Pentauusahaan BMD	2 Dokumen	5.724.750	2 Dokumen	5.724.750	2 Dokumen	5.724.750	1 Dokumen	5.724.750	7 Dokumen	22.899.000
5	0 2	0 3	2 .0 1	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi BMD	1 Laporan	53.341.791,3	-	53.341.791,3	-	53.341.791,3	-	53.341.791,3	1 Laporan	213.367.165
5	0 2	0 3	2 .0 1	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah tanah untuk bangunan tempat kerja	1 Dokumen	14,126,500	-	14,126,500	-	14,126,500	-	14,126,500	1 Dokumen	56.506,000
5	0 2	0 3	2 .0 1	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan Hasil penilaian Barang Milik Daerah	1 Lokasi	125.833.750	-	125.833.750	-	125.833.750	-	125.833.750	1 Lokasi	503.335.000

5	0 2	0 3	2 0 1	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan kegiatan usulan penjualan, pemusnahan, dan penghapusan BMD	2 Laporan	41.435.250	2 Laporan	41.435.250	1 Laporan	41.435.250	1 Laporan	41.435.250	6 Laporan	165.741.000
5	0 2	0 3	2 0 1	1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahanan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	22.601.450,5	2 Laporan	22.601.450,5	2 Laporan	22.601.450,5	1 Laporan	22.601.450,5	7 Laporan	90.405.802
5	0 2	0 3	2 0 1	1 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	32.923.958	4 Laporan	32.923.958	3 Laporan	32.923.958	3 Laporan	32.923.958	14 Laporan	131.695.832
5	0 2	0 3	2 0 1	1 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah perwali standarisasi harga dan biaya	1 Laporan	9.677.500	1 Laporan	9.677.500	1 Laporan	9.677.500	1 Laporan	9.677.500	4 Laporan	38.710.000
5	0 2	0 4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah</b>	6%		6%		6%		6%		24%	
5	0 2	0 4	2 0 0 1	1	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah</b>	25%		25%		25%		25%		100%	
5	0 2	0 4	2 0 0 1	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Laporan kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	1 Laporan	337.894.479	-	337.894.479	-	337.894.479	-	337.894.479	1 Laporan	1.351.577.916
5	0 2	0 4	2 0 0 1	3	Penyalinan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan Penyalinan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	4,619,500	1 Laporan	4,619,500	1 Laporan	4,619,500	1 Laporan	4,619,500	4 Laporan	18,478,000
5	0 2	0 4	2 0 0 1	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Peta Digitalisasi PBB yang terupdate	5 Peta	17,246,250	4 Peta	17,246,250	4 Peta	17,246,250	4 Peta	17,246,250	17 Peta	68,985,000
5	0 2	0 4	2 0 0 1	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Dokumen BPHTB yang tervalidasi Laporan Penilaian PBBP2	200 Dokumen	6,045,000	200 Dokumen	6,045,000	200 Dokumen	6,045,000	200 Dokumen	6,045,000	800 Dokumen	24,180,000
5	0 2	0 4	2 0 0 1	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Berkas SPPT PBB P2	9000 SPPT	16,554,750	9000 SPPT	16,554,750	9000 SPPT	16,554,750	9000 SPPT	16,554,750	36000 SPPT	66,219,000
5	0 2	0 4	2 0 0 1	1 0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Jenis Pajak	3 Laporan	1,969,750	3 Laporan	1,969,750	3 Laporan	1,969,750	3 Laporan	1,969,750	12 Laporan	7,879,000

5	0	0	4	2	1	Penagihan Pajak Daerah	Jenis laporan	2 Jenis	63.349.000	8 Jenis	253.396.000						
5	0	0	4	2	1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan tunggakan wajib pajak	3 Laporan	29,219,250	12 Laporan	116,877,000						
5	0	0	4	2	1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Raperda tentang Retribusi Daerah dan Raperwal tentang Retribusi Daerah serta Laporan pembinaan retribusi	1 Dokumen	21.796.250	1 Dokumen	21.796.250	1 Dokumen	21.796.250	-	21.796.250	3 Dokumen	87.185.000

## **BAB V** **PENUTUP**

Renja Perubahan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Magelang tahun 2022.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai upaya mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Magelang maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Perubahan Tahun 2022 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Magelang.

Magelang, 1 Agustus 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH  
KOTA MAGELANG



**SUSILOWATI, SE, MT, M.Sc**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19721101 199803 2 008

Lampiran

Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2022 Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang  
Tahun 2022



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2022 NOMOR 39

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka pendanaannya disesuaikan dengan perubahan kebijakan dan dinamika keadaan, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menunjukkan adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi, sehingga perlu adanya perubahan;  
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun 2022.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022 disusun dengan sistematika:

- a. BAB I : pendahuluan;
- b. BAB II : gambaran umum kondisi daerah;
- c. BAB III : kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- d. BAB IV : sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- e. BAB V : rencana kerja dan pendanaan daerah;
- f. BAB VI : kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- g. BAB VII : penutup.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 21 Juli 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 39

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Secara terminologi perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam konteks yang lebih luas sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah, maka perencanaan pembangunan daerah disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah tingkat provinsi.

Perencanaan pembangunan disusun berjenjang menurut periode tahun perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD merupakan penjabaran 5 (lima) tahunan dari RPJPD, menjadi panduan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan dijabarkan dalam dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Keistimewaan penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 adalah disusun pada masa transisi antara pelaksanaan RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, Tahap ke-III (periode Tahun 2016-2021) ke Tahap ke-IV (periode tahun 2021-2025). Selain itu, RKPD 2022 disusun ketika pandemi Covid 19 masih melanda Indonesia dan dunia, yang dampaknya masih terasa di tahun 2021. Mempertimbangkan hal tersebut maka tema tahun perencanaan adalah **PULIH BERSAMA UNTUK MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA**. Tema ini untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh untuk mewujudkan tercapainya perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, berlandaskan budaya yang unggul, SDM berkualitas, dan mandiri, serta mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat madani. Tema tersebut merupakan kelanjutan tema tahun sebelumnya dengan mengakomodir berbagai dokumen perencanaan, yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, dan RPJPD Kota Magelang tahap ke IV (Tahun 2021-2025). Untuk sinergitas perencanaan, maka RKPD Kota Magelang tahun 2022 juga disusun dengan berpedoman kepada RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang tahun 2011-2031, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Dalam manajemen pembangunan daerah terdapat tiga fase yang harus dilalui yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan. Ketiga tahapan tersebut memiliki bobot dengan proporsi dan kontribusi yang saling berkaitan. Perencanaan pembangunan yang baik akan mendorong hasil capaian kinerja pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dengan dukungan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan yang tepat, efektif, dan efisien. Penyusunan dokumen perencanaan periode n+1, dilaksanakan pada periode n, dengan memperhatikan penelaahan hasil evaluasi rencana pembangunan periode sebelumnya (n-1) yang memberikan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah, serta semakin meningkatnya capaian kinerja makro daerah, capaian kinerja penyelenggaraan urusan

## BAB 7 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022 disusun pada masa transisi antara pelaksanaan RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, Tahap ke-III (periode Tahun 2016-2021) ke Tahap ke-IV (periode tahun 2021-2025). Dalam penyusunannya, RKPD 2022 mengakomodir berbagai dokumen perencanaan, yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, dan RPJPD Kota Magelang tahap ke IV (Tahun 2021-2025). Untuk sinergitas perencanaan, maka RKPD Kota Magelang tahun 2022 juga disusun dengan berpedoman kepada RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang tahun 2011-2031, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 ini juga yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2022 sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2022, dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2022, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2022. Regulasi dasar penyusunan perencanaan adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan bahwa:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD

Dengan demikian maka dokumen RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta sebagai acuan dan pedoman OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dan juga untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. RKPD tahun 2022 ini merupakan bagian dari keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan perangkat daerah di Kota Magelang tahun 2022 sehingga akan menjadi landasan setiap perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2022. Usulan kegiatan yang menjadi bagian dari RKPD ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan kepada Pemerintah Pusat malalui APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pula maka penyusunan RKPD 2022 dilaksanakan dengan koordinasi antar Instansi dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, melibatkan partisipasi masyarakat dan seluruh pelaku kepentingan (stakeholder) melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Focus Group Discussion (FGD), serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota Magelang, yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelepasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan menjadi prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2022.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2020, muncul isu global yang berpengaruh sampai tingkat nasional, dan regional dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease (COVID)-19 yang berdampak pada situasi ekonomi dan sosial serta penurunan kemampuan keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan RKPD tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Magelang berkewajiban

untuk melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan melakukan analisa terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2022 ke dalam Renja OPD 2022 serta prioritas dan pagu indikatif OPD 2022.

Demikian agar dokumen perencanaan tahunan RKPD 2022 ini dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

WALIKOTA MAGELANG,  
MUCHAMAD NUR AZIZ